

## Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palu

Jl. Tanjung Dako No. 15 94112 085733558241

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/palu/id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah / Kantor

# Persetujuan/ Penolakan Permintaan UP dan/atau TUP pada KPPN

Pelayanan Perbendaharaan Negara Palu

No. SK :

## Persyaratan

1. Pengajuan Uang Persediaan (UP): Surat Permohonan Persetujuan UP beserta Surat Pernyataan UP.
2. Pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP): Surat Permohonan Persetujuan TUP dilampiri dengan Rincian Rencana Penggunaan dana TUP untuk 1 (satu) bulan dan Surat Pernyataan TUP.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Proses Persetujuan UP: a. Pegawai Seksi MSKI/PDMS menerima Surat Permohonan Persetujuan UP dari Satuan Kerja beserta dokumen pendukung melalui Aplikasi SAKTI; b. Pegawai Seksi MSKI/PDMS melakukan pengujian atas dokumen yang diajukan oleh Satker sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. Apabila data tidak sesuai, Pegawai Seksi MSKI/PDMS menolak permohonan Pengajuan Persetujuan UP dengan mengisi alasan penolakan melalui aplikasi SAKTI; d. Apabila data telah sesuai, Pegawai Seksi MSKI/PDMS membuat konsep Surat Persetujuan UP dengan melampirkan dokumen pendukung dan meneruskan persetujuan UP secara berjenjang hingga Kepala KPPN; e. Atasan Pegawai Seksi MSKI/PDMS secara berjenjang memeriksa dan menyetujui UP yang diajukan melalui aplikasi SAKTI beserta Konsep Surat Persetujuan UP; f. Pegawai Seksi MSKI/PDMS menyampaikan Surat Persetujuan UP kepada Satker melalui sarana/kontak resmi masing-masing KPPN
2. Proses Persetujuan TUP: a. Pegawai Seksi MSKI/PDMS menerima Surat Permohonan Persetujuan TUP dari Satuan Kerja beserta dokumen pendukung melalui Aplikasi SAKTI; b. Pegawai Seksi MSKI/PDMS menguji dokumen dan data permintaan TUP sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memonitor Karwas TUP pada Aplikasi yang disediakan oleh DJPb; c. Apabila data tidak sesuai, Pegawai Seksi MSKI/PDMS menolak permohonan Pengajuan Persetujuan TUP dengan mengisi alasan penolakan melalui aplikasi SAKTI; d. Apabila data telah sesuai, Pegawai Seksi MSKI/PDMS membuat konsep Surat Persetujuan TUP dengan melampirkan dokumen pendukung dan meneruskan persetujuan TUP secara berjenjang hingga Kepala KPPN; e. Atasan Pegawai Seksi MSKI/PDMS secara berjenjang memeriksa dan menyetujui TUP yang diajukan melalui aplikasi SAKTI beserta Konsep Surat Persetujuan UP; f. Pegawai Seksi MSKI/PDMS menyampaikan Surat Persetujuan TUP kepada Satker melalui sarana/kontak resmi masing-masing KPPN.

## Waktu Penyelesaian

# Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palu

Jl. Tanjung Dako No. 15 94112 085733558241

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/palu/id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah / Kantor  
Pelayanan Perbendaharaan Negara Palu

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja setelah dokumen diterima dengan benar dan lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat persetujuan UP/TUP; atau 2. Informasi penolakan pengajuan UP/TUP melalui SAKTI.

## Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan atas layanan disampaikan melalui kanal berupa:

Saluran Pengaduan KPPN Palu: [bit.ly/Pengaduan051](https://bit.ly/Pengaduan051)

Saluran Pengaduan DJPb: <https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id/>

Saluran Pengaduan Wise: <https://www.wise.kemenkeu.go.id/#/>

Saluran Pengaduan Gratifikasi: <https://gol.kpk.go.id/>

Saluran Pengaduan SP4N Lapor: <https://www.lapor.go.id/>

Email Pengaduan KPPN Palu: [upgkppn051@gmail.com](mailto:upgkppn051@gmail.com)

Telepon: +6282271513804